



# LAKIP

( Laporan Aktualisasi Kinerja Instansi Pemerintah )

LPMP Kalimantan Utara

# 2017



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Utara, telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Kepala LPMP Kalimantan Utara, atas pelaksanaan tugas dan fungsinya menopang tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyelenggarakan program pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan, dan Penjaminan Mutu Pendidikan, sebagaimana diatur dalam Permendikbud No.6 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendikbud No 14 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP yang memuat keberadaan LPMP Kalimantan Utara yang memiliki rincian tugas dan fungsi yang sama dengan LPMP Papua Barat, LPMP Kepulauan Riau dan LPMP Sulawesi Barat. Oleh karenanya LPMP Kalimantan Utara menyusun laporan yang terkait pada perkembangan pelaksanaan Peningkatan Mutu Pendidikan di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara

Secara umum laporan ini menyajikan target dan capaian kinerja LPMP Kalimantan Utara selama tahun 2017, dimulai dari pelantikan Pejabat di lingkungan LPMP Kalimantan Utara. Namun laporan ini meliputi kinerja atas kegiatan yang terkait dengan kegiatan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

1. Satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya,
2. Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP,
3. Sekolah model yang dikembangkan mutu pendidikannya,
4. Fasilitasi peningkatan sumber daya pendidikan menengah sesuai 8 standar,
5. Layanan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan,
6. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

Keenam kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari tujuan strategis LPMP Kalimantan Utara dan merupakan tugas utama LPMP dalam melaksanakan berbagai programnya guna merealisasikan target penjaminan mutu pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja LPMP Kalimantan Utara tahun 2017, serta Rencana Strategis LPMP Kalimantan Utara tahun 2015–2019. Untuk masing-masing program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja, sehingga evaluasi terhadap capaian kinerja menjadi jelas, terukur dan akuntabel.

Target hasil secara umum dari program LPMP Kalimantan Utara tahun anggaran 2017 berhasil dicapai dengan baik, bahkan untuk beberapa indikator kinerja target dapat tercapai secara signifikan. Sejalan dengan itu, penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik juga telah menunjukkan kinerja yang cukup signifikan melalui implementasi penguatan sistem manajemen mutu dan prosedur

perencanaan, koordinasi, pengelolaan anggaran, pengelolaan barang milik negara (BMN), kepegawaian, kerumahtanggaan serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam upaya percepatan pencapaian target beberapa program telah menempuh berbagai langkah terobosan berdasarkan amanat undang-undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan undang-undang no 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen, peraturan pemerintah no. 74 tahun 2008 tentang guru dan Permendiknas no. 3 tahun 2009 tentang Sistem/ Penjaminan Mutu Pendidikan yang terbukti cukup efektif dalam mendorong kinerja seluruh jajaran LPMP Kalimantan Utara berperan secara aktif.

Di pihak lain, LPMP Kalimantan Utara menyadari bahwa tantangan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di tingkat propinsi masih cukup banyak dan memerlukan kerja keras pada tahun-tahun mendatang. Diharapkan, dukungan semua pihak dalam menjawab tantangan yang masih harus ditangani sebagaimana ditargetkan, yang pada saatnya akan dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja LPMP Kalimantan Utara selama tahun 2017. Selain itu, Laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan peningkatan penjaminan mutu pendidikan serta peningkatan mutu PTK pada tahun mendatang. Akhirnya kepada Semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan ini, kami sampaikan terimakasih.

Tanjung Selor, 5 Januari 2018

Ketua LPMP Kalimantan Utara



Dr. J. Woko, M.Pd

NIP. 197003191997031001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
<i>EKSEKUTIF SUMMARY</i> .....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.    Gambaran Umum.....	1
B.    Dasar Hukum .....	4
C.    Tugas dan Fungsi .....	4
D.    Struktur Organisasi .....	5
E.    Mekanisme Kerja .....	10
F.    Permasalahan.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A.    Capaian Kinerja Organisasi .....	16
B.    Capaian Kerja Pegawai .....	40
BAB IV PENUTUP .....	42
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	44

## ***EXECUTIVE SUMMARY***

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPMP Kalimantan Utara Sebagai Unit Eselon II Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjabarkan berbagai kegiatan-kegiatan dan program penjaminan mutu pendidikan di tingkat propinsi. Laporan ini disusun dalam rangka pemenuhan kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP LPMP Kalimantan Utara merupakan laporan kinerja tahun pertama atas pelaksanaan Rencana Strategis LPMP Kalimantan Utara tahun 2015–2019. Laporan ini memberikan informasi tingkat pencapaian indikator kinerja sebagaimana yang dilaksanakan LPMP Kalimantan Utara selama tiga bulan sejak pelantikan Pejabat.

LPMP Kalimantan Utara, sesuai dengan tugas dan fungsi, melaksanakan peningkatan layanan penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP, sedangkan kegiatan terdiri dari kegiatan pemetaan mutu satuan pendidikan, fasilitasi satuan pendidikan berdasarkan 8 SNP, pengembangan mutu pendidikan sekolah model dan kegiatan rutin, yang meliputi berbagai kegiatan administrasi dan sifatnya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPMP Kalimantan Utara.

Sesuai pengukuran kinerja yang dibandingkan dengan rencana strategis LPMP Kalimantan Utara tahun 2015-2019, dalam tahun 2017 LPMP Kalimantan Utara melakukan Pelaksanaan urusan administrasi LPMP. Serta pengumpulan data-data ketercapaian lima indikator kinerja yang pada dasarnya masih merupakan target dan sasaran pencapaian LPMP Kalimantan Timur. Selanjutnya LPMP Kalimantan Utara selama jeda waktu September 2017 sampai dengan Desember 2017 melakukan koordinasi dengan stakeholder maupun satuan pendidikan di wilayah provinsi Kalimantan Utara.

LAKIP disusun sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi tentang kinerja pemerintah dan kebermanfaatannya, antara lain :

1. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah (*good governance*) yang didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Menjadikan jalannya pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

3. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah/LPMP.

LAKIP juga digunakan sebagai bahan masukan bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menentukan kebijakan lebih lanjut. Dalam kurun waktu Agustus sampai dengan Desember 2017, LPMP Kalimantan Utara menghadapi kendala-kendala yang berkaitan dengan pendanaan yang diperuntukan biaya operasional maupun sebagai pembiayaan pelaksanaan kegiatan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan Kalimantan Utara.

Namun demikian capaian kinerja LPMP Kalimantan Utara, mulai Agustus sampai dengan Desember tahun 2017 atas tujuan strategis meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan, yaitu:

1. Satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya
2. Satuan pendidikan yang telah di fasilitasi berdasarkan 8 SNP
3. Sekolah model yang telah dikembangkan mutu pendidikannya
4. Layanan kemitraan di bidang peningkatan mutu pendidikan
5. Data dan informasi Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

Capaian lima indikator diatas merupakan data satuan pendidikan yang ada Kalimantan Utara.

Berdasarkan data tersebut diatas, kendala yang dihadapi LPMP Kalimantan Utara dalam satu tahun kedepan bisa diatasi melalui perencanaan RKA-KL yang matang. Pencapaian indikator kinerja yang menjadi rencana strategis tahun 2015-2019 yang dilaksanakan LPMP Kalimantan Utara selama dua tahun kedepan.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum**

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan negara tersebut sekaligus menjadi tujuan pendidikan yang dikembangkan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 31 memperjelas bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender.

Sistem pendidikan yang dianut di Indonesia mengandung asas demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dengan tetap mengedepankan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan pendidikan yang meliputi ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu, terjangkau, dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam penjaminan mutu pendidikan, LPMP Kalimantan Utara harus melaporkan seluruh aktivitasnya agar terjadi transparansi dalam penggunaan anggaran. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 18 ayat 1 maka LPMP Kalimantan Utara sebagai lembaga pemerintah di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, wajib menyusun dan menyajikan laporan pelaksanaan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban publik merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan pemerintahan yang demokratis sebagai mekanisme untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pemerintah ini diterbitkan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan target pembangunan secara efektif dan efisien. Dengan diberlakukannya pembangunan berbasis kinerja maka penyusunan LAKIP menjadi salah satu instrumen teknis yang menjadi alat ukur keberhasilan pembangunan yang dijalankan oleh setiap unit instansi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Selanjutnya, untuk memperkuat pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri ini memberikan landasan operasional dalam menyusun dan menetapkan serta mengevaluasi keberhasilan penyelenggaraan pembangunan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang:

1. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dari sasaran strategis LPMP Kalimantan Utara;
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
3. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. LPMP Kalimantan Utara memiliki ketersediaan sumber daya manusia sejumlah 4 orang PNS yang merupakan pejabat pemerintah yang dilantik sebagai bagian awal dalam pembangunan LPMP Kalimantan Utara. 4 orang ini merupakan formasi 1 orang Kepala, 2 orang Kepala Seksi dan 1 orang Kepala Sub Bagian Umum, sebagai cikal bakal pengoperasionalan lembaga. Namun seiring dengan semakin cepatnya keterlibatan LPMP Kalimantan Utara di provincie Kalimantan Utara, diformasikan sejumlah tenaga Non-PNS yang membantu dalam pelaksanaan administrasi kelembagaan. Terhitung akhir Desember 2017 formasi dalam LPMP Kalimantan Utara menjadi 9 orang PNS dan 20 orang NonPNS, dengan kualifikasi pegawai S-3 sejumlah 1 orang, S-2 sejumlah 7 orang, S-1 sejumlah 10 orang, D3 sejumlah 3 orang dan SMA/SMK sejumlah 3 orang.

Upaya pelayanan prima terus ditingkatkan melalui keterampilan personil LPMP Kalimantan Utara dalam memberikan data dan informasi kepada Satuan Pendidikan. Dalam rentang waktu 4 bulan kegiatan secara personal LPMP Kalimantan Utara telah memberikan pelayanan tentang pembelajaran kepada satuan pendidikan berdasarkan permintaan. Sedangkan dalam mendukung kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, LPMP Kalimantan Utara telah memberikan sumbangsih personal dalam melakukan pengawasan pada kegiatan test PKB maupun dalam pelatihan operator data satuan pendidikan.

Peningkatan kemampuan pegawai LPMP Kalimantan Utara juga menjadi pencapaian kinerja kelembagaan, karena pada dasarnya LPMP Kalimantan Utara memiliki personil yang beda latar belakang pekerjaan. Sehingga LPMP Kalimantan Utara berangkat dari langkah paling dasar dalam jabatan pekerjaan yang di emban. Meskipun sarana dan prasarana yang dimiliki sangat minim, tidak

menutup kemampuan untuk tetap bekerja mencapai target kelembagaan. LPMP Kalimantan Utara saat ini menggunakan/berkantor sementara pada ruko di daerah perkantoran sementara pemerintah provinsi Kalimantan Utara, dan mendapatkan peralatan perkantoran sementara untuk mendukung seluruh kegiatan.

Perencanaan Kantor Utama LPMP Kalimantan Utara berada di daerah luar dari kota, yaitu terletak di Km 9 Tanjung Selor, Kecamatan Bumi Rahayu. Area yang menjadi kantor seluas 4 hektar dan bereda dekat dengan pemukiman transmigrasi. Diharapkan kedepannya LPMP Kalimantan Utara dalam memiliki atau gedung kantor yang sesuai dengan kebutuhan dan menunjang tugas dan fungsi kelembagaan. Seiring semakin dikenalnya LPMP Kalimantan Utara di masyarakat luas, semakin meningkat juga permintaan untuk membimbing satuan pendidikan. Permintaan tersebut dapat dilayani dengan metode LPMP Kalimantan Utara berkunjung ke satuan pendidikan yang data dijangkau.

Pelaksanaan kunjungan ini didukung dengan diberlakukannya otonomi daerah telah membuka peluang yang luas bagi LPMP Kalimantan Utara untuk melaksanakan program kemitraan dengan dinas terkait dalam upaya peningkatan mutu pendidikan maupun dengan satuan pendidikan. Sampai dengan Desember 2017 LPMP Kalimantan Utara telah mengunjungi satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung yang secara geografis dapat di tempuh dalam rentang waktu 3 sampai 6 jam dengan transport darat. Sedangkan Kota Tarakan ditempuh dalam waktu 1.5 jam melalui jalan sungai dan Kabupaten Nunukan selama 2 sampai 3 jam melalui transportasi sungai. Dengan adanya pola kemitraan diharapkan muncul sinergi positif dalam upaya mempercepat proses peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di Kalimantan Utara. Tidak hanya melayani dinas terkait di wilayah Kalimantan Utara, LPMP Kalimantan Utara juga telah menjalin kemitraan dengan lembaga di luar provinsi Kalimantan Utara.

Kebijakan otonomi memberikan peluang dan juga tantangan. Terjalannya kemitraan antara LPMP Kalimantan Utara dengan berbagai institusi dari berbagai daerah tidak selalu berjalan mulus. Ketidaksinkronan kebijakan daerah dan pusat, dan perubahan kebijakan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah yang bermuatan politis seringkali menjadi hambatan yang perlu disikapi dengan bijaksana oleh LPMP Kalimantan Utara. Sementara itu, kehadiran lembaga lain di Kalimantan Utara yang memiliki tugas dan fungsi sama dengan LPMP Kalimantan Utara juga memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga, terutama berkaitan dengan keberlangsungan program kemitraan dengan pemerintah daerah.

## **B. Dasar Hukum**

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan kebudayaan
4. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP);
5. Permendikbud Nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendikbud No 14 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan; dan,
6. Permendikbud Nomor 9 Tahun 2016, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## **C. Tugas dan Fungsi**

Tugas dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan sesuai dengan Permendikbud No. 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara, dinyatakan memiliki tugas melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugasnya LPMP menyelenggarakan fungsi:

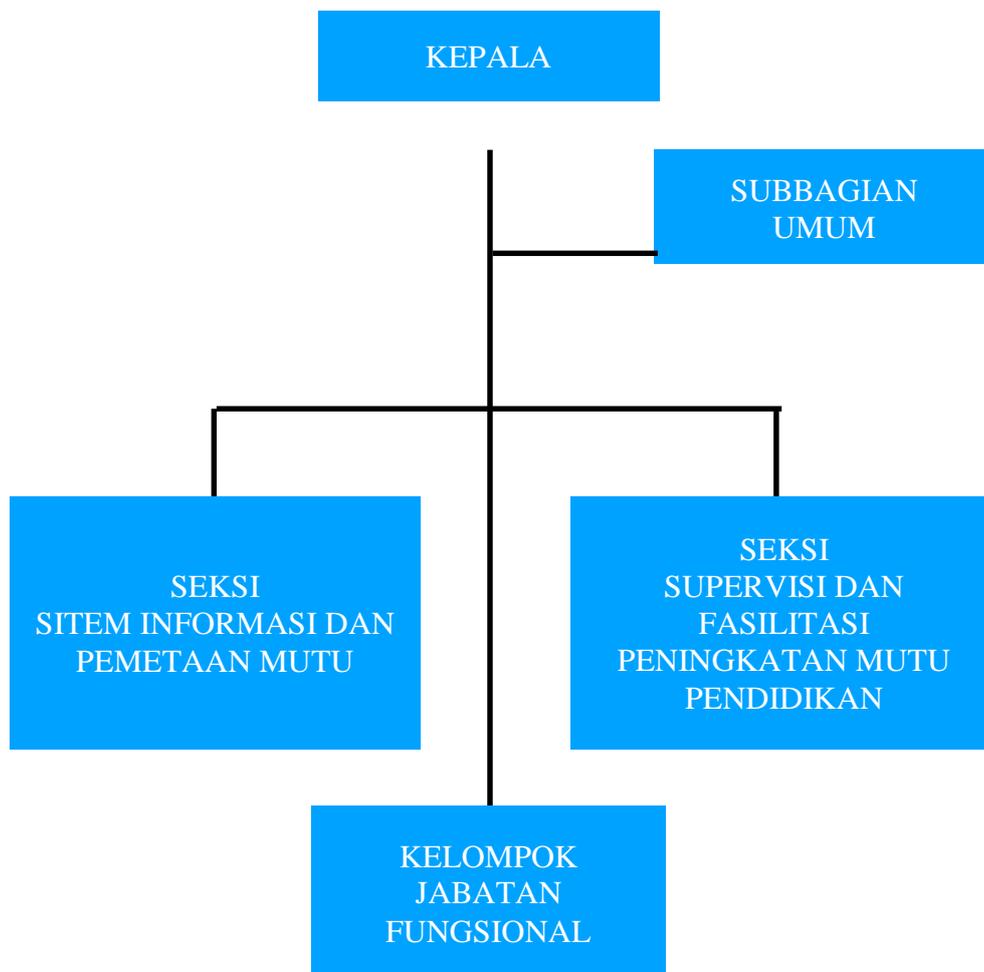
1. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
2. Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan
3. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu nasional;
4. Pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah secara nasional;
5. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional;
6. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan,
7. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara, maka Organisasi LPMP Kalimantan Utara terdiri atas:

1. Kepala;

2. Kepala Bagian Umum;
3. Kepala Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu Pendidikan;
4. Kepala Seksi Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional (Pengembangan Teknologi Pembelajaran/PTP).

#### D. Struktur Organisasi



Bagan 1.1. Struktur Organisasi LPMP Kalimantan Utara  
(Berdasarkan Permendikbud No 6 Tahun 2017)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala LPMP dibantu dengan Sub Bagian Umum dan dua Seksi serta Jabatan Fungsional, yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi:

1. Kepala LPMP, dengan rincian tugas:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja LPMP;
  - b. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
  - c. melaksanakan pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;

- d. melaksanakan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
  - e. melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
  - f. melaksanakan analisis hasil pemetaan dan supervisi mutu pendidikan;
  - g. melaksanakan pemberian rekomendasi hasil pemetaan dan supervisi mutu pendidikan kepada unit kerja/instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya;
  - h. melaksanakan penyusunan laporan hasil pemetaan dan supervisi mutu pendidikan;
  - i. melaksanakan penyusunan laporan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan
  - j. melaksanakan kerja sama di bidang peningkatan mutu pendidikan
  - k. melaksanakan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi wilayah kerjanya;
  - l. melaksanakan penyajian dan penyebarluasan data dan informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah kepada provinsi dan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya;
  - m. melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan LPMP;
  - n. melaksanakan pendayagunaan laboratorium LPMP;
  - o. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen LPMP; dan,
  - p. melaksanakan penyusunan laporan LPMP.
2. Sub Bagian Umum, rincian tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja LPMP;
  - b. melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran LPMP;
  - c. melakukan urusan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran LPMP;
  - d. melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya;
  - e. melakukan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan LPMP;
  - f. melakukan penyusunan bahan usul formasi dan rencana pengembangan pegawai LPMP;
  - g. melakukan urusan penerimaan, pengangkatan, penempatan, kepangkatan, dan pemindahan pegawai serta mutasi lainnya di lingkungan LPMP;
  - h. melakukan urusan pengembangan, disiplin, dan usul pemberian penghargaan pegawai LPMP;
  - i. melakukan penyusunan data dan informasi kepegawaian, penilaian prestasi/kinerja pegawai, dan administrasi kepegawaian lainnya di lingkungan LPMP;

- j. melakukan pengadministrasian penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu;
  - k. melakukan penyiapan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, izin belajar, dan tugas belajar;
  - l. melakukan penyusunan usul pembuatan kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pensiun, tabungan perumahan, dan dokumen kepegawaian lainnya;
  - m. melakukan penyusunan bahan analisis organisasi, analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja LPMP;
  - n. melakukan penyusunan bahan peta bisnis proses, sistem dan prosedur kerja, dan standar pelayanan di lingkungan LPMP;
  - o. melakukan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;
  - p. melakukan urusan penataan, pemeliharaan, dan usul penghapusan arsip;
  - q. melakukan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan LPMP;
  - r. melakukan pengelolaan perpustakaan dan poliklinik LPMP;
  - s. melakukan urusan keprotokolan, upacara, penerimaan tamu, dan rapat dinas pimpinan;
  - t. melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan LPMP;
  - u. melakukan urusan pengaturan penggunaan peralatan kantor, kendaraan dinas, dan gedung kantor serta sarana dan prasarana lainnya di lingkungan Lembaga;
  - v. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, dan penyimpanan sarana dan prasarana LPMP;
  - w. melakukan urusan pendayagunaan, pemeliharaan, inventarisasi, dan usul penghapusan barang milik negara LPMP;
  - x. melakukan sistem manajemen dan akuntansi barang milik negara di lingkungan LPMP;
  - y. melakukan urusan penyusunan laporan keuangan di lingkungan LPMP;
  - z. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
3. melakukan penyusunan laporan Subbagian dan konsep laporan LPMP Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu Pendidikan, rincian tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penyusunan program kerja Seksi;
  - b. melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
  - c. melakukan penyiapan perangkat sistem informasi pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
  - d. melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;

- e. melakukan validasi data dan informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
  - f. melakukan penyajian dan penyebarluasan data dan informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
  - g. melakukan pemeliharaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
  - h. melakukan penyusunan bahan pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
  - i. melakukan pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
  - j. melakukan analisis hasil pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
  - k. melakukan penyusunan rekomendasi hasil pemetaan mutu pendidikan kepada unit kerja/instansi terkait dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya;
  - l. melakukan penyusunan laporan hasil pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
  - m. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
  - n. melakukan penyusunan laporan Seksi.
4. Seksi Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan, rincian tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penyusunan program kerja Seksi
  - b. melakukan penyusunan bahan supervisi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan
  - c. melakukan supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan
  - d. melakukan analisis hasil supervisi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
  - e. melakukan penyusunan rekomendasi hasil supervisi mutu pendidikan kepada unit kerja/instansi terkait dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya;
  - f. melakukan diseminasi hasil supervisi kepada provinsi dan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya;
  - g. melakukan penyusunan bahan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
  - h. melakukan pemberian layanan, bimbingan, dan bantuan teknis implementasi standar nasional pendidikan;
  - i. melakukan penyusunan bahan kerja sama peningkatan mutu pendidikan;

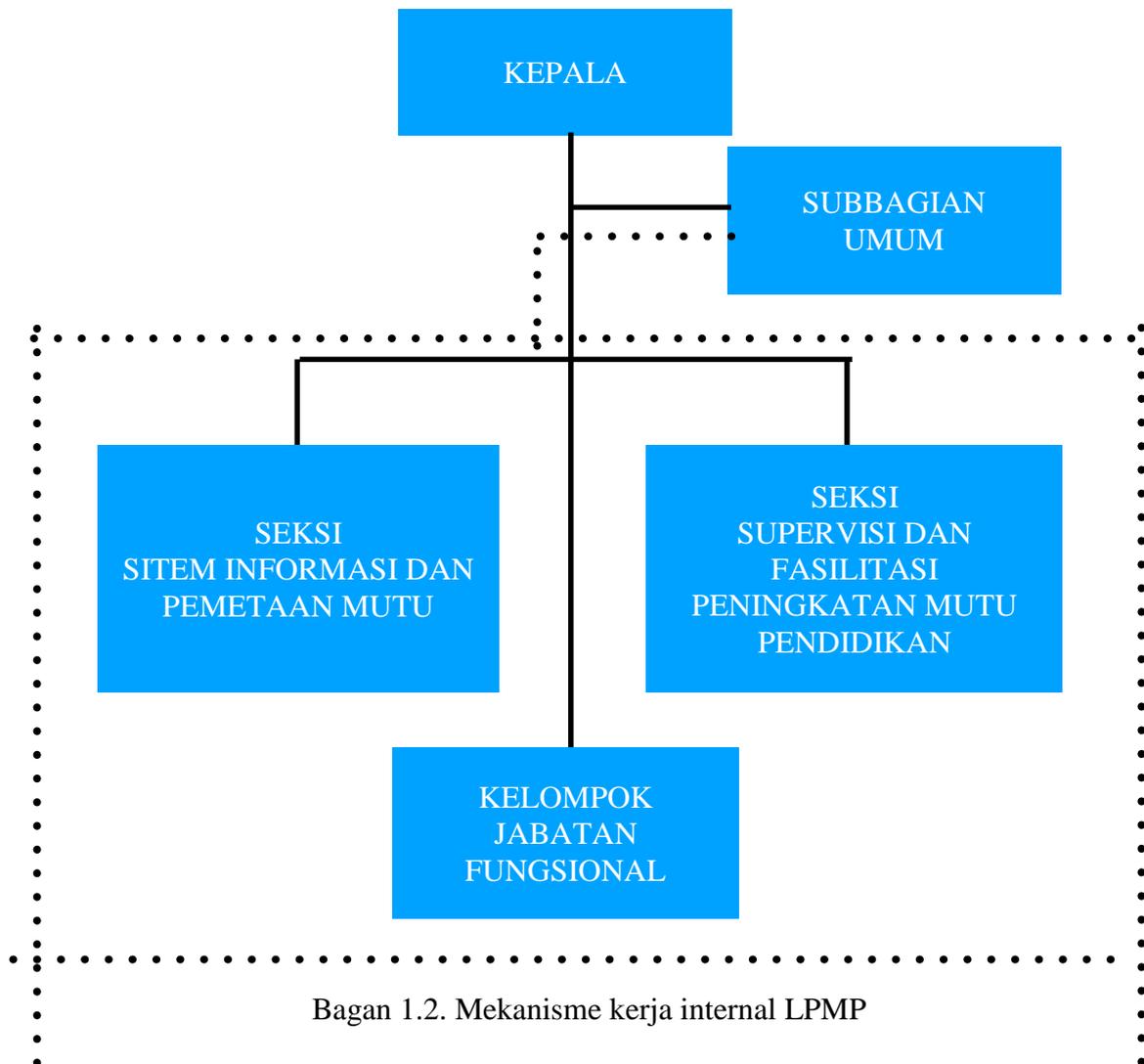
- j. melakukan analisis hasil pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
- k. melakukan penyusunan rekomendasi hasil pemetaan mutu pendidikan kepada unit kerja/instansi terkait dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya;
- l. melakukan penyusunan laporan hasil pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
- m. melakukan pendayagunaan laboratorium LPMP;
- n. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
- o. melakukan penyusunan laporan Seksi.

Berdasarkan perundangan yang berlaku, uraian rincian tugas setiap bagian dalam LPMP Kalimantan Utara memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah.

Lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP) adalah unit pelaksana teknis Kementarian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, maka Kepala LPMP wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Kepala LPMP juga menyampaikan hasil pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta supervisi dan fasilitasi sumber daya pendidikan terhadap satuan pendidikan kepada pemerintah, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota.

## E. Mekanisme Kerja

### 1. Mekanisme kerja Internal



## 2. Mekanisme kerja Eksternal



Bagan 1.3. Mekanisme kerja eksternal LPMP

Berdasarkan dua bagan diatas mekanisme kerja LPMP Kalimantan Utara terbagi dalam dua model secara internal yaitu LPMP memiliki tiga bagian utama yang saling berkaitan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dua seksi saling mendukung dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan. Sedangkan bagian umum memberikan dukungan manajemen. Secara eksternal kerja LPMP Kalimantan Utara dimulai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan program yang ditangani oleh LPMP untuk diberikan kepada satuan pendidikan sebagai target utama dalam peningkatan mutu pendidikan.

### F. Permasalahan

Dalam rentang waktu lima bulan, LPMP Kalimantan Utara lebih banyak melakukan kegiatan penjaminan mutu pendidikan dengan metode kunjungan ke satuan pendidikan dan memberikan bimbingan tentang pelaksanaan manajemen sekolah yang lebih baik. LPMP Kalimantan Utara masih belum memiliki DIPA Tahun Anggaran 2017, sehingga dalam pencapaian target yang rancang dalam Renstra 2015-2019, hanya merupakan data dan informasi tentang satuan pendidikan yang terpetakan

mutunya, satuan pendidikan yang terfasilitasi pencapaian 8 SNP dan satuan pendidikan yang difasilitasi pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan.

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA LPMP

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Utara pada tahun 2017 melaksanakan kegiatan berpedoman pada tugas dan fungsi secara administratif dan akademik dengan sasaran strategis meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan. Berdasarkan sasaran strategis tersebut melahirkan delapan indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase SD yang telah dipetakan mutu pendidikannya.
2. Persentase SMP yang telah dipetakan mutu pendidikannya.
3. Persentase SMA yang telah dipetakan mutu pendidikannya.
4. Persentase SMK yang telah dipetakan mutu pendidikannya.
5. Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP.
6. Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP.
7. Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP.
8. Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP.

Dari ke delapan indikator kinerja tersebut dirumuskan untuk menghasilkan output, yaitu:

1. SD yang telah dipetakan mutu pendidikannya.
2. SMP yang telah dipetakan mutu pendidikannya.
3. SMA yang telah dipetakan mutu pendidikannya.
4. SMK yang telah dipetakan mutu pendidikannya.
5. SD yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP.
6. SMP yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP.
7. SMA yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP.
8. SMA yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP

Pada tabel di bawah ini ditampilkan penjabaran kinerja LPMP Kalimantan Utara dalam tahun 2017:

Tabel 2.1. Pencapaian sasaran strategis LPMP Kalimantan Utara tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target(*)	Anggaran(*)
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang telah dipetakan mutu pendidikannya	820 SD, SMP, SMA dan SMK	
	1    Persentase SD yang telah dipetakan mutunya	100%	
	Output :		

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target(*)</b>	<b>Anggaran(*)</b>	
	SD yang terpetakan Mutu Pendidikannya	504 Sekolah		
	2	Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya	100%	
		Output :		
		SMP yang terpetakan Mutu Pendidikannya	210 sekolah	
	3	Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya	100%	
		Output :		
		SMA yang terpetakan Mutu Pendidikannya	82 sekolah	
	4	Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya	100%	
		Output :		
		SMK yang terpetakan Mutu Pendidikannya	24 sekolah	
		Persentase Satuan Pendidikan yang telah di fasilitasi berdasarkan 8 SNP	820 SD, SMP, SMA dan SMK	
	5	Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	100%	
		Output :		
		SD yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	20 sekolah	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target(*)	Anggaran(*)	
	6	Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	100%	
		Output :		
		SMP yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	20 sekolah	
	7	Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	100%	
		Output :		
		SMA yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	20 sekolah	
	8	Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	100%	
		Output :		
		SMK yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	20 sekolah	

\* target dalam table diatas merupakan data seluruh sekolah yang tercantum dalam web [kaltara.siap-online.com](http://kaltara.siap-online.com)

\* DIPA Tahun 2017 LPMP Kalimantan Utara masih termuat dalam DIPA Tahun 2017 LPMP Kalimantan Timur

LPMP Kalimantan Utara dalam Laporan ini, belum melaporkan penyerapan anggaran sebagaimana seharusnya dilakukan. Tabel diatas merupakan data satuan pendidikan yang telah mendapatkan layanan penjaminan mutu pendidikan, yang anggaran berada pada LPMP Kalimantan Timur. DIPA LPMP Kalimantan Utara sendiri baru diterbitkan pada tanggal 5 Desember 2017, sehingga untuk pembiayaan urusan perkantoran belum dapat diselenggarakan sebagaiman mestinya.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai dengan penetapan kinerja pegawai seperti yang tertuang dalam surat keputusan pengangkatan pegawai atau pelantikan pejabat administrasi dan pengawas pada tanggal 4 Agustus 2017, LPMP Kalimantan Utara berkewajiban untuk mencapai target-target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi atau lembaga. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan instansi atau lembaga dalam upaya pencapaian sasaran strategisnya dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, maka diperlukan suatu gambaran tentang capaian-capaian kinerja tersebut. Di bawah ini diuraikan hasil capaian kinerja LPMP Kalimantan Utara sebagai implementasi kebijakan yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab menuju akuntabilitas kegiatan lembaga.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka menciptakan akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan LPMP Kalimantan Utara maka dibutuhkan analisis pencapaian dari masing-masing sasaran yang telah diimplementasikan melalui program-program prioritas yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Program Prioritas dan Realisasinya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Anggaran	Realisasi			
		Jumlah	Satuan		Kinerja	%	Anggaran	%
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang telah dipetakan mutu pendidikannya	820	SD, SMP, SMA, SMK		757	92.32		
	1 Persentase SD yang telah dipetakan mutunya	100%						
	Output :							

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Anggaran	Realisasi			
		Jumlah	Satuan		Kinerja	%	Anggaran	%
	SD yang terpetakan Mutu Pendidikannya	464	sekolah		236	50.86		
	2	Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya	100%					
		Output :						
		SMP yang terpetakan Mutu Pendidikannya	170		115	67.65		
	3	Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya	100%					
		Output :						
		SMA yang terpetakan Mutu Pendidikannya	59		35	59.32		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target		Anggaran	Realisasi			
			Jumlah	Satuan		Kinerja	%	Anggaran	%
	4	Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya	100%						
		Output :							
		SMK yang terpetakan Mutu Pendidikannya	24			22	91.67		
		Persentase Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	820						
	5	Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	100%						
		Output :							

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Anggaran	Realisasi			
		Jumlah	Satuan		Kinerja	%	Anggaran	%
	SD yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	504			190	37.70		
6	Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	100%						
	Output :							
	SMP yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	210			97	46.19		
7	Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	100%						

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Anggaran	Realisasi			
		Jumlah	Satuan		Kinerja	%	Anggaran	%
	Output :							
	SMA yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	82			48	58.54		
8	Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	100%						
	Output :							
	SMK yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	24			36	150.00		

Secara keseluruhan pencapaian indikator kinerja LPMP Kalimantan Utara dapat dijelaskan sebagai berikut :

**1. Persentase SD yang telah dipetakan mutu pendidikannya di Kalimantan Utara**

Indikator kinerja persentase SD telah dipetakan mutu pendidikannya di Kalimantan Utara belum mencapai target renstra yang ditetapkan yaitu 100% atau sejumlah 464 SD. Capaian indikator ini baru sekitar 50.86% atau sejumlah 236 SD dari target renstra. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu

(1) jumlah pengawas, yang tidak memenuhi untuk melaksanakan pemetaan mutu pendidikan; (2) lokasi SD yang jauh sehingga tidak dapat ditempuh dalam waktu yang ditargetkan. Hal ini disebabkan beberapa kabupaten kota mengirimkan pengawas SD-nya berasal dari dalam kota/kabupaten saja, sedangkan SD yang akan dibimbing berada jauh dari kota kabupaten. Kendala lain adalah jaringan internet yang tidak tersedia di daerah satuan pendidikan. Meskipun demikian ketercapaian target tersebut didukung dengan beberapa hal sebagai berikut; 1) Fungsi koordinasi berjalan dengan baik antara LPMP Kalimantan Utara dengan Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 2) Adanya strategi pencapaian dengan melibatkan unsur diluar LPMP yaitu pengawas diseluruh kabupaten/kota dan dinas pendidikan kabupaten/kota.

Pada tahun 2016, melalui surat edaran Ditjen Dikdasmen, poin 3, dinyatakan bahwa dalam rangka pemetaan mutu pendidikan, seluruh sekolah wajib melakukan pemetaan melalui aplikasi pemetaan mutu pendidikan yang terintegrasi dengan Dapodik, sehingga baik sekolah maupun pihak-pihak terkait fokus dalam memfasilitasi pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan ini.

a) Gambaran Umum Capaian SNP

Dari 464 sekolah dasar yang dipetakan mutunya, sebanyak 236 sekolah yang dapat diolah peta mutunya. Data yang digunakan dalam pengolahan dan analisis peta capaian SNP Tahun 2017 ini diperoleh dari data yang terkumpul di server pusat. Akan tetapi karena ada kendala teknis, tidak semua sub indikator dapat diolah datanya. Sehingga data yang digunakan dalam pengolahan data ini tidak lengkap, hanya meliputi 5 standar yang tercakup dalam 14 indikator dan 61 sub indikator.

Adapun 5 standar yang akan diolah dalam peta capaian mutu ini adalah:

- 1) Standar Kompetensi Lulusan;
- 2) Standar Isi;
- 3) Standar Proses
- 4) Standar Penilaian; dan
- 5) Standar Pengelolaan.

Skor capaian pemenuhan SNP berkisar antara 0 – 7. Untuk dapat mengetahui capaian pemenuhan SNP, maka dibuat pengkategorian untuk memudahkan analisis, yaitu:

- 1) 0 - 2.04 Menuju SNP level 1 ;
- 2) 2.05 - 3.7 Menuju SNP level 2 ;
- 3) 3.71 - 5.06 Menuju SNP level 3;
- 4) 5.07 - 6.66 Menuju SNP level 4;
- 5) 6.67 - 7 SNP

Peta capaian mutu jenjang Sekolah Dasar (SD) Kalimantan Utara dapat dilihat pada Grafik 3.1.berikut ini:



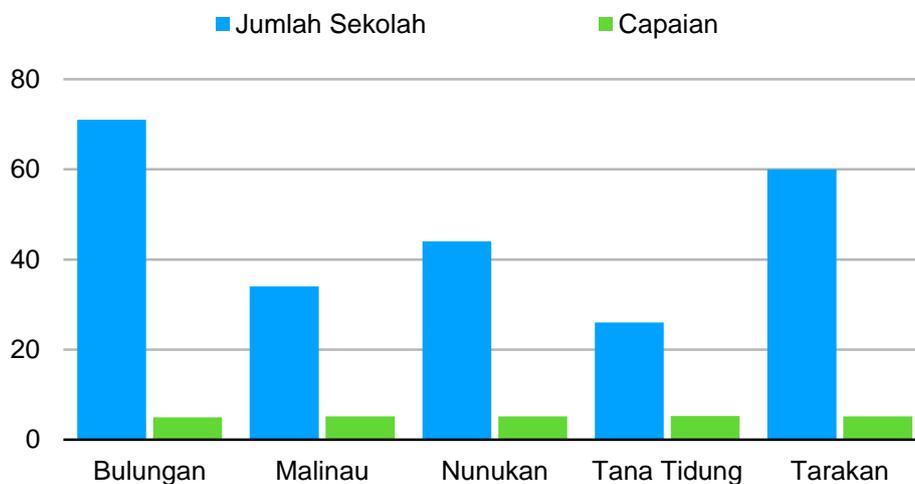
Grafik 3.1. Peta Capaian Mutu SD di Kalimantan Utara

Skor peta capaian mutu jenjang SD untuk masing-masing kabupaten/kota dipaparkan pada tabel 3.1 dibawah ini (*disadur dari data PMP Dikdasmn*)

Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah	Capaian	Kelompok
Kab. Bulungan	71	4.94	★★★★
Kab. Malinau	34	5.15	★★★★★
Kab. Nunukan	44	5.15	★★★★★
Kab. Tana Tidung	26	5.22	★★★★★
Kota Tarakan	60	5.16	★★★★★

Tabel 3.1. Skor Peta Capaian Mutu SD di Kalimantan Utara

Berdasarkan data pada Tabel 3.2 dapat diketahui bahwa capaian mutu SNP jenjang SD di 5 kabupaten/kota seluruhnya dapat dikategorikan “menuju SNP level 3”. Jadi dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan jenjang SD di Kalimantan Utara belum mencapai SNP. Bila dilihat dari jumlah sekolahnya, gambaran capaian mutu dipaparkan pada gambar 3.3 berikut:

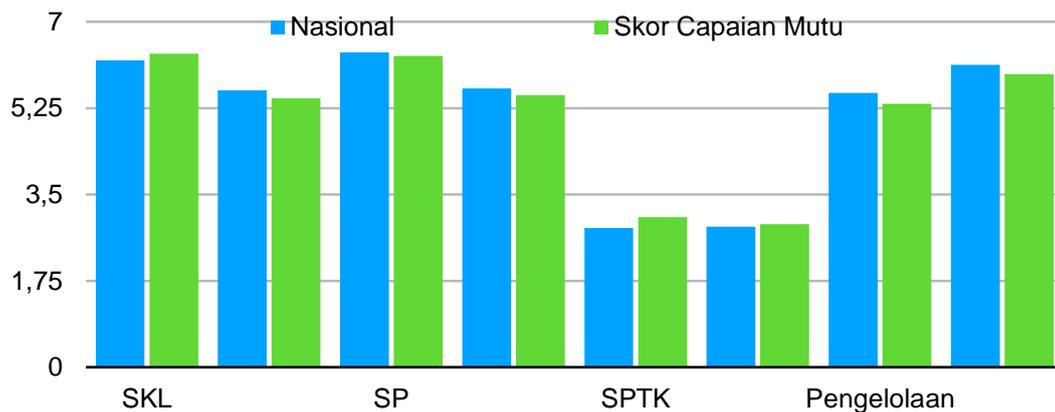


Gambar 3.1. Gambaran Capaian Mutu SD di Kalimantan Utara Berdasarkan SNP

Secara umum capaian mutu SNP jenjang SD di 5 kabupaten/kota seluruhnya dapat dikategorikan “menuju SNP level 4”, tetapi bila dilihat dari masing-masing SD ada 61.70% SD yang capaian mutunya “menuju SNP level 4”. Sementara itu, ada 0.43% SD yang dapat dikategorikan capaian mutunya “menuju SNP level 1”, dan 2.13% SD capaian mutunya “menuju SNP level 2”.

b) Capaian SNP untuk Setiap Standar di LPMP Kalimantan Utara

Gambaran capaian mutu jenjang SD di Kalimantan Utara untuk masing-masing standar dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut:



Gambar 3.2. Gambaran Capaian Mutu SD di Kalimantan Utara berdasarkan SNP

Skor capaian mutu jenjang SD di Kalimantan Utara untuk masing-masing standar dipaparkan pada tabel 3.3 dibawah ini;

Tabel 3.3. Skor Capaian Mutu SD di Kalimantan Utara

No	Standar Nasional Pendidikan	Nasional	Skor Capaian Mutu
1	Standar Kompetensi Lulusan	6.22	6.35
2	Standar Isi	5.61	5.45
3	Standar Proses	6.38	6.31
4	Standar Penilaian Pendidikan	5.65	5.51
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.82	3.04
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	2.85	2.9
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	5.56	5.34
8	Standar Pembiayaan	6.13	5.95

Berdasarkan tabel 3.2. dapat diketahui bahwa capaian mutu jenjang SD di Kalimantan Utara secara umum belum mencapai SNP. Capaian mutu yang paling baik adalah pada standar kompetensi lulusan dengan skor mutu 6.35 dan capaian mutu yang paling rendah ada pada standar sarana dan prasarana dengan skor mutu 2.9.

c) Hambatan dan kendala

Target 504 sekolah dasar tidak tercapai karena adanya kendala pendanaan di pada DIPA tahun 2017. Dari 465 Sekolah Dasar yang telah terpetakan, ternyata hanya 157 sekolah yang dapat diolah peta mutunya. Hal ini disebabkan oleh kendala teknis dalam penggunaan aplikasi Pemetaan Data Mutu, yaitu (1) spesifikasi komputer yang digunakan untuk menjalankan aplikasi PMP harus tinggi, sedangkan kebanyakan sekolah tidak memiliki komputer yang memadai; (2) jumlah pertanyaan yang sangat banyak juga mempengaruhi kinerja aplikasi; (3) server pusat pemetaan data mutu belum mampu untuk menerima data yang sangat besar dalam waktu yang bersamaan, sehingga menyulitkan sekolah dalam pengiriman data. Di samping kendala teknis, tidak dilatihnya operator sekolah tentang penggunaan aplikasi PMP juga merupakan kendala tersendiri.

d) Langkah antisipasi yang dilakukan ke depan

Untuk memecahkan kendala di atas, hal yang harus dilakukan adalah: Pertama, pemerintah perlu meningkatkan jumlah sasaran sesuai dengan target sasaran jumlah sekolah yang akan dipetakan. Kedua, perlu penyempurnaan aplikasi pemetaan mutu dan pengurangan jumlah pertanyaan pada kuisioner, sehingga sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan sarana komputer tetap bisa menggunakan aplikasi tersebut tanpa mengalami kendala berarti. Ketiga, server pusat sebaiknya lebih disiapkan kinerjanya untuk menerima data dari seluruh sekolah di Indonesia. Keempat, ke depan disamping melatih pengawas, operator sekolah juga dilatih tentang penggunaan aplikasi PMP.

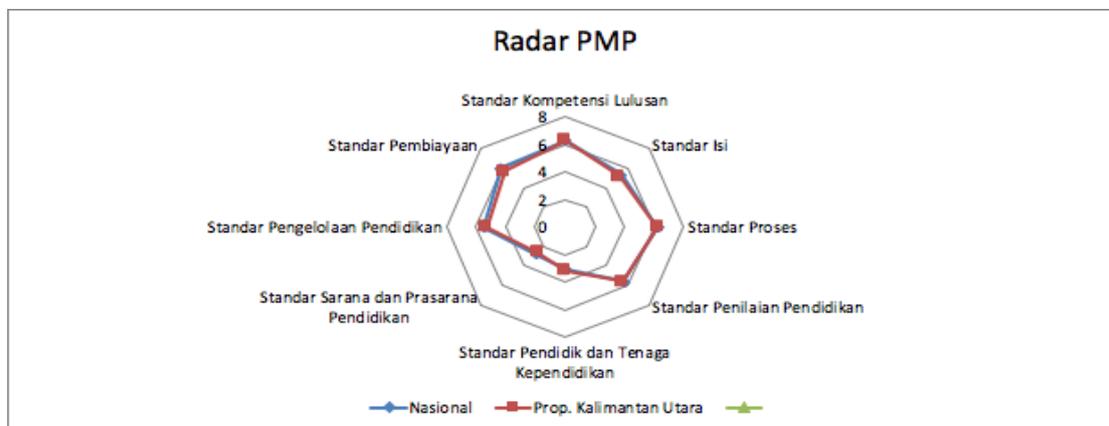
Capaian realisasi tersebut didukung oleh dua kegiatan, yaitu Pelatihan Pengawas dan Fasilitator Daerah terdiri dari Kedua kegiatan Pelatihan Fasilitator Daerah dan Pelatihan Pengawas Daerah seluruh jenjang pendidikan serta kegiatan bimbingan teknis.

## **2. Persentase SMP yang telah dipetakan mutu pendidikannya di Kalimantan Utara**

Indikator kinerja persentase SMP telah dipetakan mutu pendidikannya di Kalimantan Utara belum mencapai target sejumlah 170 SMP. Capaian indikator ini baru 115 SMP. Hal ini dikarenakan adanya kendala terkait jumlah anggaran yang tersedia. Hal ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut; 1) Fungsi koordinasi berjalan dengan baik antara LPMP Jawa Tengah dengan Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 2) Adanya strategi pencapaian dengan melibatkan unsur diluar LPMP yaitu pengawas diseluruh kabupaten/kota dan dinas pendidikan kabupaten/kota.

a) Gambaran Umum Capaian SNP

Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang dilibatkan dalam analisis ini sebanyak 170 sekolah. Peta capaian mutu jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kalimantan Utara dapat dilihat pada grafik berikut ini:



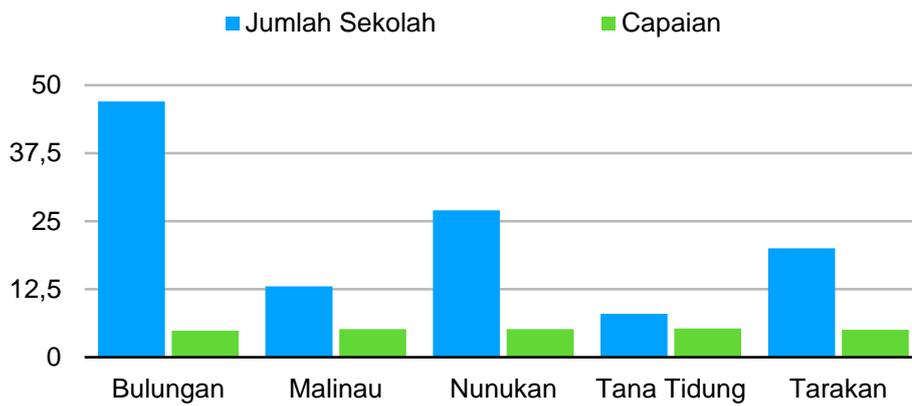
Grafik 3.3. Peta Capaian Mutu SMP di Kalimantan Utara

Skor peta capaian mutu jenjang SMP untuk masing-masing kabupaten/kota dipaparkan pada tabel 3.4 berikut:

Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah	Capaian	Kelompok
Kab. Bulungan	47	4.84	★★★
Kab. Malinau	13	5.14	★★★★
Kab. Nunukan	27	5.15	★★★★
Kab. Tana Tidung	8	5.29	★★★★
Kota Tarakan	20	5.06	★★★★

Tabel 3.4. Skor Peta Capaian Mutu SMP di Kalimantan Utara

Berdasarkan data pada Tabel 3.4 di atas dapat diketahui bahwa capaian mutu SNP jenjang SMP di 5 kabupaten/kota sebagian besar dapat dikategorikan “menuju SNP level 3”. Jadi dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan jenjang SMP di Kalimantan Utara belum mencapai SNP. Bila dilihat dari jumlah sekolahnya, gambaran capaian mutu pendidikan dipaparkan pada gambar berikut:

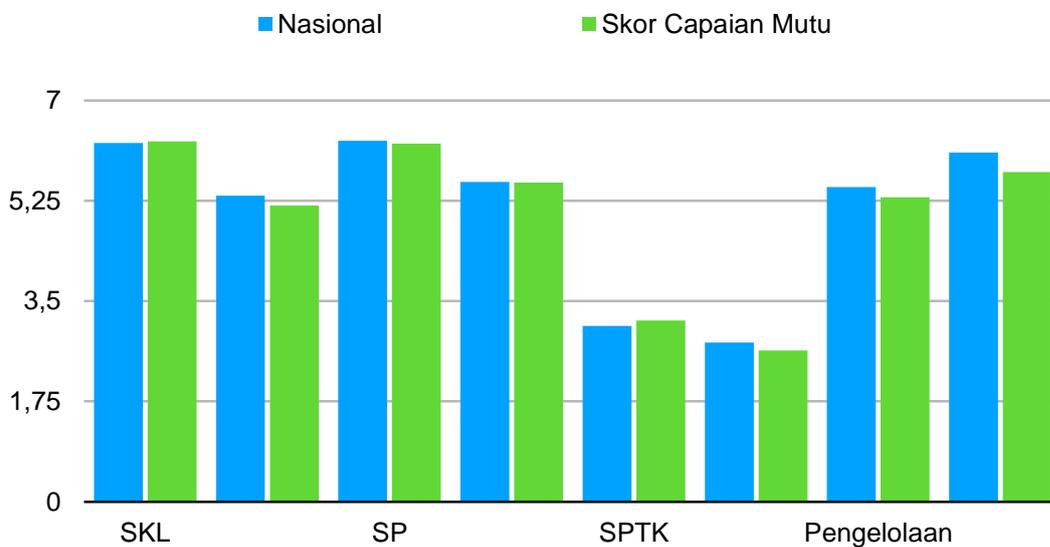


Gambar 3.3. Gambaran Capaian Mutu SMP di Kalimantan Utara berdasarkan SNP

Secara umum capaian mutu SNP jenjang SMP di 5 kabupaten/kota dapat dikategorikan “menuju SNP level 3”, tetapi bila dilihat dari masing-masing SMP ada 0.87% SMP yang capaian mutunya “menuju SNP level 1”. Sementara itu, ada 56.52% SMP yang dapat dikategorikan capaian mutunya “menuju SNP level 4”. Hal ini menunjukkan ada beberapa SMP di Kalimantan Utara yang capaian mutu SNP-nya hampir mendekati SNP.

b) Capaian SNP untuk Setiap Standar

Gambaran capaian mutu jenjang SMP Kalimantan Utara untuk masing-masing standar dapat dilihat pada gambar 3.4 berikut:



Gambar 3.4. Gambaran Capaian Mutu SMP di Kalimantan Utara berdasarkan SNP

Skor capaian mutu jenjang SMP Kalimantan Utara untuk masing-masing standar dipaparkan pada tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5. Daftar Skor Capaian Mutu SMP di Kalimantan Utara

No	Standar Nasional Pendidikan	Nasional	Skor Capaian Mutu
1	Standar Kompetensi Lulusan	6.26	6.29
2	Standar Isi	5.34	5.17
3	Standar Proses	6.3	6.25
4	Standar Penilaian Pendidikan	5.58	5.57
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.07	3.16
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	2.78	2.64
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	5.49	5.31
8	Standar Pembiayaan	6.09	5.75

Berdasarkan tabel 3.5 dapat diketahui bahwa capaian mutu jenjang SMP di Kalimantan Utara secara umum belum mencapai SNP. Capaian mutu yang paling baik adalah pada standar kompetensi lulusan dengan skor mutu 6.29 dan capaian mutu yang paling rendah ada pada standar sarana dan prasarana dengan skor mutu 2.64.

c) Hambatan dan kendala

Target 170 Sekolah Menengah Pertama tidak tercapai karena adanya kendala pendanaan di tingkat pusat. Dari 170 SMP yang telah terpetakan, ternyata hanya 115 sekolah yang dapat diolah peta mutunya. Hal ini disebabkan oleh kendala teknis dalam penggunaan aplikasi Pemetaan Data Mutu, yaitu (1) spesifikasi komputer yang digunakan untuk menjalankan aplikasi PMP harus tinggi, sedangkan kebanyakan sekolah tidak memiliki komputer yang memadai; (2) jumlah pertanyaan yang sangat banyak juga mempengaruhi kinerja aplikasi; (3) server pusat Pemetaan Data Mutu belum mampu untuk menerima data yang sangat besar dalam waktu yang bersamaan sehingga menyulitkan sekolah dalam pengiriman data. Selain kendala teknis, tidak dilatihnya operator sekolah tentang penggunaan aplikasi PMP juga merupakan kendala tersendiri.

d) Langkah antisipasi yang dilakukan ke depan

Untuk memecahkan kendala tersebut, hal yang harus dilakukan adalah: Pertama, pemerintah perlu meningkatkan jumlah sasaran sesuai dengan target sasaran jumlah sekolah yang akan dipetakan. Kedua, perlu penyempurnaan aplikasi pemetaan mutu dan pengurangan jumlah pertanyaan pada kuisioner sehingga sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan sarana komputer tetap bisa

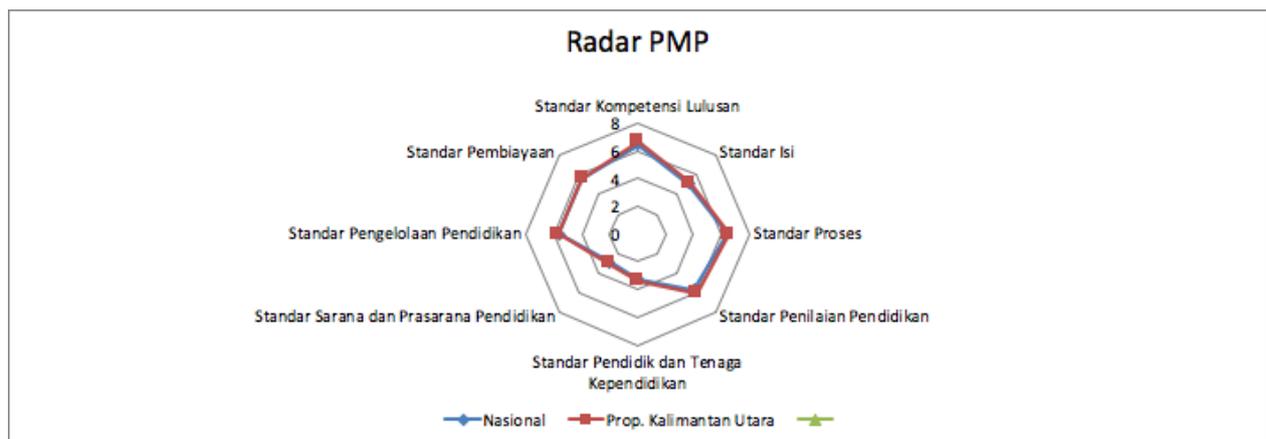
menggunakan aplikasi tersebut tanpa mengalami kendala berarti. Ketiga, server pusat sebaiknya lebih disiapkan kinerjanya untuk menerima data dari seluruh sekolah di Indonesia. Keempat, ke depan, selain melatih pengawas, operator sekolah juga dilatih tentang penggunaan aplikasi PMP.

### 3. Persentase SMA yang telah dipetakan mutu pendidikannya di Kalimantan Utara

Indikator kinerja persentase SMA telah dipetakan mutu pendidikannya di Kalimantan Utara belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% atau sejumlah 59 SMA. Capaian indikator kinerja sebesar 59.25% atau sejumlah 35 SMA. Hal ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut; 1) Fungsi koordinasi berjalan dengan baik antara LPMP Kalimantan Utara dengan Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 2) Adanya strategi pencapaian dengan melibatkan unsur diluar LPMP yaitu pengawas diseluruh kabupaten/kota dan dinas pendidikan kabupaten/kota.

#### a) Gambaran Umum Capaian SNP

Jumlah Sekolah Menengah Atas yang dilibatkan dalam analisis ini sebanyak 57 sekolah. Namun hanya sekitar 35 SMA yang dapat diolah peta mutunya. Peta capaian mutu jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Kalimantan Utara dapat dilihat pada grafik 3.4 berikut ini:



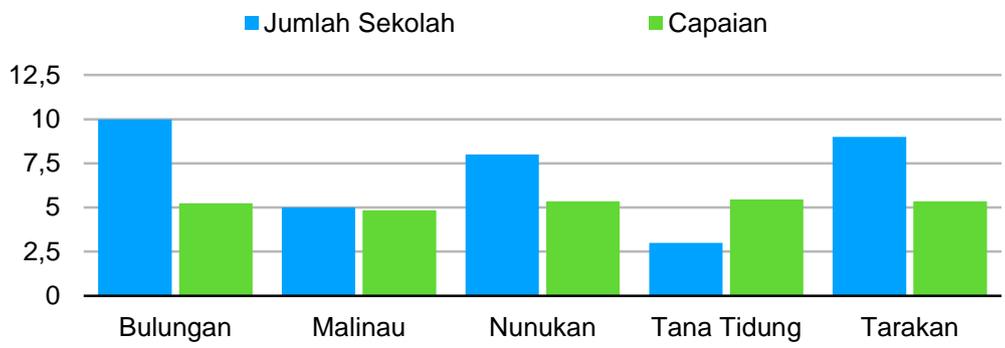
Grafik 3.4. Peta Capaian Mutu SMA di Kalimantan Utara

Skor peta capaian mutu jenjang SMA untuk masing-masing kabupaten/kota dipaparkan pada tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6. Skor Peta Capaian Mutu SMA di Kalimantan Utara

Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah	Capaian	Kelompok
Kab. Bulungan	10	5.24	★★★★
Kab. Malinau	5	4.84	★★★
Kab. Nunukan	8	5.35	★★★★
Kab. Tana Tidung	3	5.46	★★★★
Kota Tarakan	9	5.34	★★★★

Berdasarkan data pada Tabel 3.6 di atas, dapat diketahui bahwa capaian mutu SNP jenjang SMA di 5 kabupaten/kota sebagian besar dapat dikategorikan “menuju SNP level 3”. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa mutu pendidikan jenjang SMA di Kalimantan Utara belum mencapai SNP. Bila dilihat dari jumlah sekolahnya, gambaran capaian mutu dipaparkan pada gambar berikut:

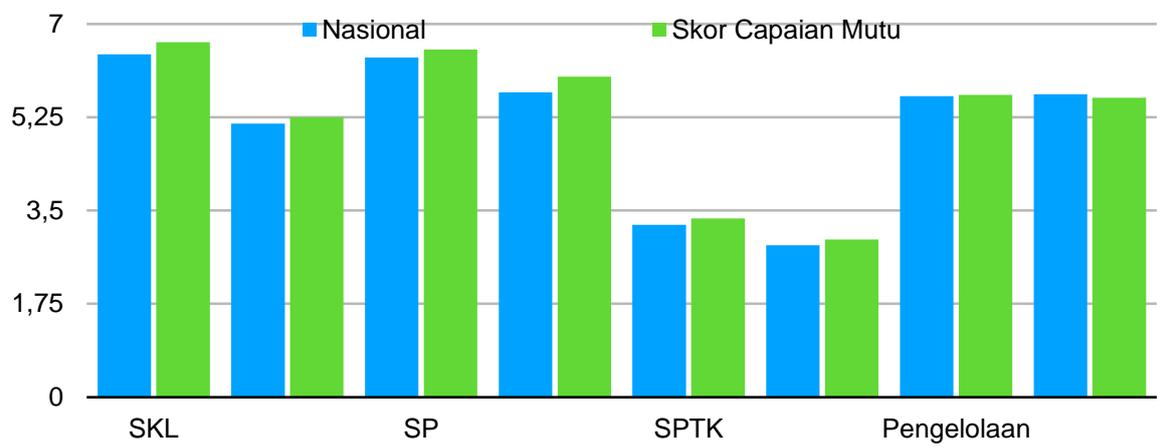


Gambar 3.6. Gambaran Capaian Mutu SMA di Kalimantan Utara berdasarkan jumlah sekolah

Secara umum capaian mutu SNP jenjang SMA di 5 kabupaten/kota dapat dikategorikan “menuju SNP level 3”, tetapi bila dilihat dari masing-masing SMA ada 68.57% SMA yang capaian mutunya “menuju SNP level 4”. Sementara itu, ada 31.43% SMA yang dapat dikategorikan capaian mutunya “menuju SNP level 3”. Hal ini menunjukkan hampir sebagian SMA di Kalimantan Utara yang capaian mutu SNP-nya hampir mendekati SNP.

b) Capaian SNP untuk Setiap Standar

Gambaran capaian mutu jenjang SMA Kalimantan Utara untuk masing-masing standar dapat dilihat pada gambar 3.6 berikut.



Gambar 3.6. Gambaran Capaian Mutu SMA di Kalimantan Utara berdasarkan Standar

Skor capaian mutu jenjang SMA Kalimantan Utara untuk masing-masing standar dipaparkan pada tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7. Skor Capaian Mutu SMA di Kalimantan Utara berdasarkan SNP

No	Standar Nasional Pendidikan	Nasional	Skor Capaian Mutu
1	Standar Kompetensi Lulusan	6.43	6.66
2	Standar Isi	5.13	5.25
3	Standar Proses	6.37	6.52
4	Standar Penilaian Pendidikan	5.72	6.01
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.23	3.35
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	2.85	2.96
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	5.65	5.67
8	Standar Pembiayaan	5.68	5.62

Berdasarkan tabel 3.7 dapat diketahui bahwa capaian mutu jenjang SMA di Kalimantan Utara secara umum belum mencapai SNP. Capaian mutu yang paling baik adalah pada standar kompetensi lulusan dengan skor mutu 6.66 dan capaian mutu yang paling rendah ada pada standar sarana dan prasarana dengan skor mutu 2.96.

c) Hambatan dan kendala

Target 59 Sekolah Menengah Atas tidak tercapai hanya 35 sekolah yang dapat diolah peta mutunya. Hal ini disebabkan oleh kendala teknis dalam penggunaan aplikasi Pemetaan Data Mutu, yaitu (1) spesifikasi komputer yang digunakan untuk menjalankan aplikasi PMP harus tinggi, sedangkan kebanyakan sekolah tidak memiliki komputer yang memenuhi spesifikasi; (2) jumlah pertanyaan yang sangat banyak juga mempengaruhi kinerja aplikasi; (3) server pusat Pemetaan Data Mutu belum mampu untuk menerima data yang sangat besar dalam waktu yang bersamaan, sehingga menyulitkan sekolah dalam pengiriman data. Di samping kendala teknis, tidak dilatihnya operator sekolah tentang penggunaan aplikasi PMP juga merupakan kendala tersendiri.

d) Langkah antisipasi yang dilakukan ke depan

Untuk memecahkan kendala di atas, hal yang harus dilakukan adalah: Pertama, pemerintah perlu meningkatkan jumlah sasaran sesuai dengan target sasaran jumlah sekolah yang akan dipetakan. Kedua, perlu penyempurnaan aplikasi pemetaan mutu dan pengurangan jumlah pertanyaan pada kuisioner sehingga sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan sarana komputer tetap bisa menggunakan aplikasi tersebut tanpa mengalami kendala berarti. Ketiga, server pusat sebaiknya lebih

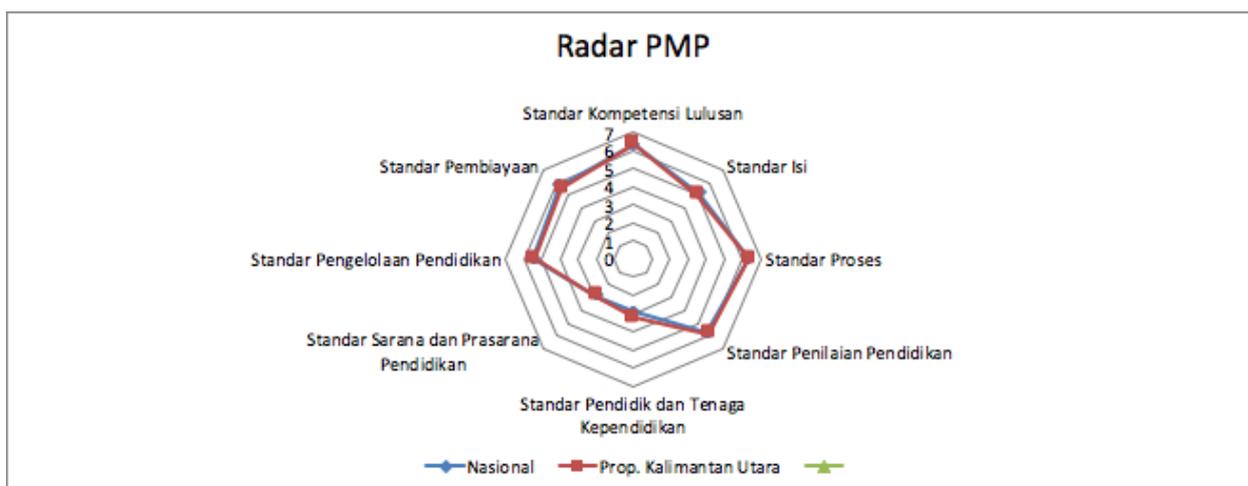
disiapkan kinerjanya untuk menerima data dari seluruh sekolah di Indonesia. Keempat, ke depan, selain melatih pengawas, operator sekolah juga dilatih tentang penggunaan aplikasi PMP.

#### 4. Persentase SMK yang telah dipetakan mutu pendidikannya di Kalimantan Utara

Indikator kinerja persentase SMK telah dipetakan mutu pendidikannya di Kalimantan Utara belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sejumlah 24 SMK. Capaian indikator ini baru sekitar 91.67% atau sejumlah 22 SMK. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan jumlah anggaran yang tersedia dan juga beberapa hal sebagai berikut; 1) Fungsi koordinasi berjalan dengan baik antara LPMP dengan Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 2) Adanya strategi pencapaian dengan melibatkan unsur diluar LPMP yaitu pengawas diseluruh kabupaten/kota dan dinas pendidikan kabupaten/kota.

##### a) Gambaran Umum Capaian SNP

Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang dilibatkan dalam analisis ini sebanyak 24 sekolah, dan yang dapat diolah data pencapaian mutunya adalah 22 sekolah. Peta capaian mutu jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kalimantan Utara dapat dilihat pada grafik 3.5 berikut ini;



Grafik 3.5. Peta Capaian Mutu SMK di Kalimantan Utara

Skor peta capaian mutu jenjang SMK untuk masing-masing kabupaten/kota dipaparkan pada tabel 3.8 dibawah ini.

Tabel 3.8. Skor Peta Capaian Mutu SMK di Kalimantan Utara

Berdasarkan data pada Tabel 3.8 tersebut dapat diketahui bahwa capaian mutu SNP jenjang SMK di 5 kabupaten/kota sebagian besar dapat dikategorikan “menuju SNP level 3”. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa mutu pendidikan jenjang SMK di Kalimantan Utara belum mencapai SNP. Bila dilihat dari jumlah sekolahnya, gambaran capaian mutu dipaparkan pada gambar 3.10 berikut.

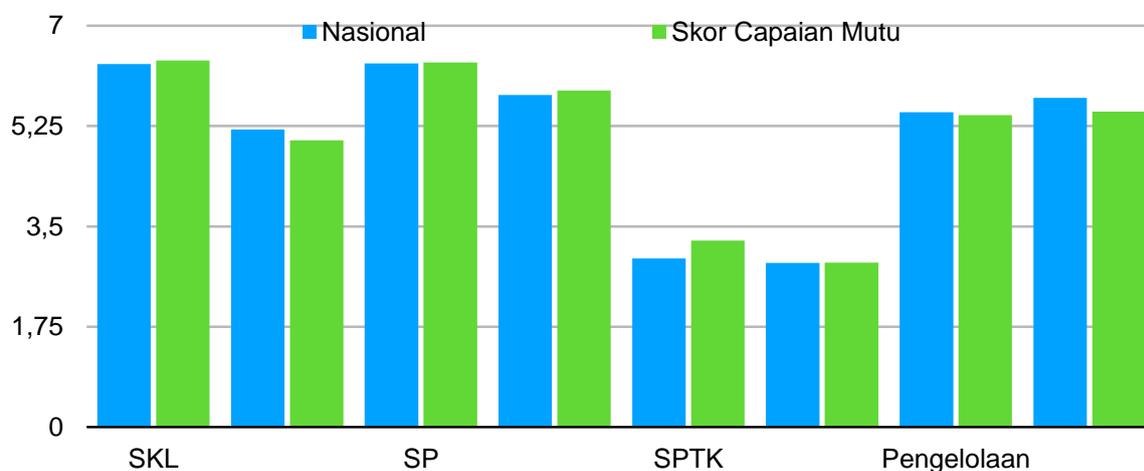


Gambar 3.10. Gambaran Capaian Mutu di Kalimantan Utara berdasarkan Jumlah Sekolah

Meskipun secara umum capaian mutu SNP jenjang SMK di 5 kabupaten/kota dapat dikategorikan “menuju SNP level 4”, akan tetapi bila dilihat dari masing-masing SMK ada 4.44% SMK yang capaian mutunya “menuju SNP level 1”. Sementara itu ada 63.64% SMK yang dapat dikategorikan capaian mutunya “menuju SNP level 4”. Hal ini menunjukkan hampir sebagian SMK di Kalimantan Utara yang capaian mutu SNP-nya hampir mendekati SNP.

b) Capaian SNP untuk Setiap Standar

Gambaran capaian mutu jenjang SMK Kalimantan Utara untuk masing-masing standar dapat dilihat pada gambar 3.11 berikut.



Gambar 3.11. Gambaran Capaian Mutu SMK di Kalimantan Utara Berdasarkan Standar

Skor capaian mutu jenjang SMK Kalimantan Utara untuk masing-masing standar dipaparkan pada tabel 3.9 dibawah ini.

Tabel 3.9. Skor Capaian Mutu SMK di Kalimantan Utara berdasarkan Standar

No	Standar Nasional Pendidikan	Nasional	Skor Capaian Mutu
1	Standar Kompetensi Lulusan	6.33	6.39
2	Standar Isi	5.19	5
3	Standar Proses	6.34	6.36
4	Standar Penilaian Pendidikan	5.79	5.87
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.94	3.25
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	2.86	2.87
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	5.49	5.44
8	Standar Pembiayaan	5.74	5.5

Berdasarkan tabel 3.9 dapat diketahui bahwa capaian mutu jenjang SMK di Kalimantan Utara secara umum belum mencapai SNP. Capaian mutu yang paling baik adalah pada standar kompetensi lulusan dengan skor mutu 6.39 dan capaian mutu yang paling rendah ada pada standar sarana dan prasarana dengan skor mutu 2.87.

c) Hambatan dan kendala

Target 24 Sekolah Menengah Kejuruan tidak tercapai, dari 24 SMA yang telah terpetakan, ternyata ada 22 sekolah yang dapat diolah peta mutunya. Ditemukan kendala teknis dalam penggunaan aplikasi Pemetaan Data Mutu, yaitu (1) spesifikasi komputer yang digunakan untuk menjalankan aplikasi PMP harus tinggi, sedangkan kebanyakan sekolah tidak memiliki komputer yang memadai; (2) jumlah pertanyaan yang sangat banyak juga mempengaruhi kinerja aplikasi; (3) server pusat Pemetaan Data Mutu belum mampu untuk menerima data yang sangat besar dalam waktu yang bersamaan, sehingga menyulitkan sekolah dalam pengiriman data. Selain kendala teknis, tidak dilatihnya operator sekolah tentang penggunaan aplikasi PMP juga merupakan kendala tersendiri.

d) Langkah antisipasi yang dilakukan ke depan

Untuk memecahkan kendala di atas, hal yang harus dilakukan adalah: Pertama, pemerintah perlu meningkatkan jumlah sasaran sesuai dengan target sasaran jumlah sekolah yang akan dipetakan. Kedua, perlu penyempurnaan aplikasi pemetaan mutu dan pengurangan jumlah pertanyaan pada kuisisioner sehingga sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan sarana komputer tetap bisa menggunakan aplikasi tersebut tanpa mengalami kendala berarti. Ketiga, server pusat sebaiknya lebih

disiapkan kinerjanya untuk menerima data dari seluruh sekolah di Indonesia. Keempat, ke depan disamping melatih pengawas, operator sekolah juga dilatih tentang penggunaan aplikasi PMP.

#### 5. Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

Indikator kinerja persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP telah terealisasi sejumlah 244 sekolah dari 272 sekolah dengan persentase capaian 48.41%. Persentase capaian realisasi kegiatan kurang dari target karena ada beberapa penyebab. Penyebab tersebut adalah: a) realisasi kegiatan SPMI adalah 20 sekolah; b) realisasi program sekolah model sebanyak 20 sekolah; c) fasilitasi pelatihan dan pendampingan kurikulum tahun 2017 sebanyak 272 sekolah; dan d) kecukupan anggaran untuk melakukan kegiatan fasilitasi di sekolah jenjang SD; serta e) fungsi koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini dinas pendidikan kabupaten/kota yang berjalan dengan baik.

- a) Pengembangan sekolah berbasis SNP melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terdiri dari Pelatihan fasilitator daerah SPMI, Pelatihan SPMI bagi Kepala Sekolah dan Pengawas serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMI di Daerah, yang meliputi kegiatan pelatihan Fasilitator daerah SPMI, pelatihan SPMI bagi Kepala Sekolah dan pengawas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMI di daerah, Bimbingan Teknis Pengawas ke sekolah yang akan dipetakan, Dari 20 SD yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP telah terealisasi sejumlah 45 SD dengan capaian sebesar 225%.
- b) Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SD terdiri dari ToT Instruktur Kabupaten/Kota, Pelatihan Kurikulum 2013 bagi guru sasaran, rapat koordinasi dengan kabupaten kota, Capacity Building bagi narasumber, pemberian bantuan pelaksanaan kurikulum.

Keterlaksanaan Implementasi kurikulum jenjang SD dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9 Rekapitulasi Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013 Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Kabupaten Bulungan	69
2	Kabupaten Malinau	32
3	Kabupaten Nunukan	33
4	Kabupaten Tana Tidung	9
5	Kota Tarakan	23
<b>Total SD Kurikulum 2013</b>		<b>166</b>

Keterlaksanaan tersebut dijelaskan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu ToT Instruktur Kabupaten/Kota Kurikulum 2013 dan Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Guru Sasaran. Beberapa alasan ketidaktercapaian tersebut, antara lain: a) jumlah kuota yang diperoleh dari pusat, tidak sama dengan data real yang diperoleh dari dinas kabupaten/kota, pada kasus ini jumlah data peserta yang dimiliki oleh dikdasmen jauh lebih besar dari data jumlah guru yang terdapat pada dinas pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota.

- c) Sekolah model yang telah dikembangkan mutu pendidikannya terdiri dari workshop sekolah model, pemberian bantuan, monitoring dan evaluasi ke sekolah model dan laporan pengembangan dan diseminasi sekolah model. Pada tahun 2017 jumlah sekolah model yang dikembangkan mutu pendidikannya adalah sejumlah 88 sekolah dari target 100 sekolah dengan capaian 88% dengan perincian 4 sekolah tiap kabupaten kota.
- d) Hambatan dan kendala

Beberapa hambatan utama yang muncul selama penyelenggaraan program adalah:

- 1) Jumlah data yang tidak sama antara data yang diperoleh dari dikdasmen dengan data yang diperoleh dari dinas pendidikan Kabupaten/Kota;
- 2) Permasalahan yang muncul di masing-masing kabupaten/kota yang berbeda-beda sehingga harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan pedoman yang ada.
- 3) Langkah antisipasi yang dilakukan ke depan

Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi hambatan tersebut adalah:

- Perlunya sinkronisasi data lebih awal antara dinas kabupaten/kota dengan LPMP Kalimantan Utara beserta Direktorat Jenderal Dikdasmen;
- Berkoordinasi dan berkonsultasi baik dengan dinas pendidikan kabupaten/kota.

Berdasarkan permasalahan di tahun 2017, rekomendasi yang diusulkan untuk menyelenggarakan program fasilitasi di tahun 2017 adalah:

- Perlunya sinkronisasi data lebih awal antara dinas Kabupaten/Kota dengan LPMP Kalimantan Utara beserta Direktorat Jenderal Dikdasmen;
- Direktorat Jenderal Dikdasmen membuat pedoman penyelenggaraan yang baku mengenai penyelenggaraan fasilitasi sebelum program fasilitasi berjalan, sehingga perubahan saat kegiatan berlangsung dapat diminimalkan.

## **6. Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP**

Indikator kinerja persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP telah terealisasi sejumlah 117 sekolah dari target sejumlah 170 sekolah dengan persentase capaian 68.82%. Persentase capaian realisasi kegiatan karena ada beberapa penyebab. Penyebab tersebut adalah: a) realisasi kegiatan SPMI adalah 20 sekolah; b) realisasi program sekolah model sebanyak

25 sekolah; c) fasilitasi pelatihan dan pendampingan kurikulum tahun 2017 sebanyak 92 sekolah; dan d) kecukupan anggaran untuk melakukan kegiatan fasilitasi di sekolah jenjang SD; serta e) fungsi koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini dinas pendidikan dan dinas pendidikan kabupaten/kota yang berjalan dengan baik.

- a) Pengembangan sekolah berbasis SNP melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terdiri atas Pelatihan fasilitator daerah SPMI, Pelatihan SPMI bagi Kepala Sekolah dan Pengawas, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMI di daerah, yang meliputi kegiatan pelatihan Fasilitator daerah SPMI, pelatihan SPMI bagi Kepala Sekolah dan pengawas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMI di daerah, Bimbingan Teknis Pengawas ke sekolah yang akan dipetakan, Best practices pelaksanaan SPMI antar LPMP, Koordinasi penjaminan Mutu antarcluster LPMP, Penyusunan profil PTK berbasis Dapodik di Kalimantan Utara. Dari 20 SMP yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP telah terealisasi sejumlah 20 SMP dengan capaian sebesar 100%.
- b) Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SMP terdiri dari ToT Instruktur Kabupaten/Kota, Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Guru sasaran, rapat koordinasi dengan kabupaten kota, Capacity Building bagi narasumber, pemberian bantuan pelaksanaan kurikulum dan pendampingan sekolah rujukan.

Keterlaksanaan Implementasi kurikulum jenjang SMP yang teruang dalam tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10 Rekapitulasi Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013 Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Kabupaten Bulungan	27
2	Kabupaten Malinau	12
3	Kabupaten Nunukan	3
4	Kabupaten Tana Tidung	16
5	Kota Tarakan	14
<b>Total SMP Kurikulum 2013</b>		<b>72</b>

Secara keseluruhan capaian pelaksanaan implementasi kurikulum 2013 jenjang SMP untuk Pelatihan Instruktur Kabupaten/Kota pada tahun 2017 adalah 93%, dan untuk Pelatihan Guru Sasaran sebesar 95,90%.

- c) Sekolah model yang telah dikembangkan mutu pendidikannya terdiri atas workshop sekolah model, pemberian bantuan, monitoring dan evaluasi ke sekolah model dan laporan

pengembangan dan diseminasi sekolah model. Pada tahun 2017 jumlah sekolah model yang dikembangkan mutu pendidikannya adalah sejumlah 25 sekolah dari target 20 dengan capaian sebesar 125% dengan perincian 4 sekolah tiap kabupaten kota.

#### 7. Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

Indikator kinerja persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP telah terealisasi sebesar 72.88% atau sejumlah 43 sekolah dari target 100% atau 59 sekolah. Persentase capaian realisasi kegiatan karena ada beberapa penyebab. Penyebab tersebut adalah: a) realisasi kegiatan SPMI adalah 20 sekolah; b) realisasi program sekolah model sebanyak 11 sekolah; c) fasilitasi pelatihan dan pendampingan kurikulum tahun 2017 sebanyak 32 sekolah; dan d) kecukupan anggaran untuk melakukan kegiatan fasilitasi di sekolah jenjang SMA; serta e) fungsi koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini dinas pendidikan dan dinas pendidikan kabupaten/kota yang berjalan dengan baik.

- a) Pengembangan sekolah berbasis SNP melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terdiri dari Pelatihan fasilitator daerah SPMI, Pelatihan SPMI bagi Kepala Sekolah dan Pengawas serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMI di Daerah, yang meliputi kegiatan pelatihan Fasilitator daerah SPMI, pelatihan SPMI bagi Kepala Sekolah dan pengawas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMI di daerah, Bimbingan Teknis Pengawas ke sekolah yang akan dipetakan, Best practices pelaksanaan SPMI antar LPMP, Koordinasi penjaminan Mutu antar cluster LPMP, Penyusunan profil PTK berbasis Dapodik di Jawa Tengah. Dari 20 SMA yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP telah terealisasi sejumlah 20 SMA dengan capaian sebesar 96,96%.
- b) Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SMA terdiri dari TOT Instruktur Kabupaten/Kota, Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Guru sasaran, rapat koordinasi dengan kabupaten kota, Capacity Building bagi narasumber, pemberian bantuan pelaksanaan kurikulum

Tabel 3.11 Rekapitulasi SMA yang melaksanakan Kurikulum 2013 Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Kabupaten Bulungan	3
2	Kabupaten Malinau	5
3	Kabupaten Nunukan	8
4	Kabupaten Tana Tidung	2
5	Kota Tarakan	5

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
<b>Total SMP Kurikulum 2013</b>		<b>23</b>

- c) Secara keseluruhan capaian pelaksanaan implementasi kurikulum 2013 jenjang SMA untuk Diklat Instruktur Kabupaten/Kota pada tahun 2017 adalah 54.24%, dan untuk Diklat Kurikulum 2013 bagi Guru Sasaran sebesar 54.24%. Ketidakhadiran tersebut disebabkan tidak ada lagi guru mata pelajaran tersebut (Agama Lainnya dan Antropologi) pada sekolah sasaran tahun 2016 dan calon peserta sudah diundang pada kegiatan pelatihan Instruktur Kab/Kota.
- d) Sekolah model yang telah dikembangkan mutu pendidikannya terdiri atas workshop sekolah model, pemberian bantuan, monitoring dan evaluasi ke sekolah model dan laporan pengembangan dan diseminasi sekolah Model. Pada tahun 2017 jumlah sekolah model yang dikembangkan mutu pendidikannya adalah sejumlah 11 sekolah dari target 20 Sekolah dengan capaian sebesar 55% dengan perincian 4 sekolah tiap kabupaten/kota.

#### **8. Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP**

Indikator kinerja persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP telah terealisasi sebesar 66.67% atau sejumlah 16 sekolah dari target 100% atau 24 sekolah dengan persentase 100%. Persentase capaian realisasi kegiatan karena ada beberapa penyebab. Penyebab tersebut adalah: a) realisasi kegiatan SPMI adalah 7 sekolah; b) realisasi program sekolah model sebanyak 7 sekolah; c) fasilitasi pelatihan dan pendampingan kurikulum tahun 2017 sebanyak 16 sekolah; dan d) kecukupan anggaran untuk melakukan kegiatan fasilitasi di sekolah jenjang SD; serta e) fungsi koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini dinas pendidikan dan dinas pendidikan kabupaten/kota yang berjalan dengan baik.

- a) Pengembangan sekolah berbasis SNP melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terdiri dari Pelatihan fasilitator daerah SPMI, Pelatihan SPMI bagi Kepala Sekolah dan Pengawas serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMI di Daerah, yang meliputi kegiatan pelatihan Fasilitator daerah SPMI, pelatihan SPMI bagi Kepala Sekolah dan pengawas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMI di daerah, Bimbingan Teknis Pengawas ke sekolah yang akan dipetakan, 24 SMK yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP telah terealisasi sejumlah 23 SMK dengan capaian sebesar 95,83%.
- b) Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SMK terdiri dari beberapa kegiatan. Diawali rapat koordinasi dengan kabupaten/kota, dilanjutkan dengan Capacity Building bagi Narasumber, ToT Instruktur Kabupaten/Kota, Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Guru sasaran, serta Pemberian Bantuan Pelaksanaan Kurikulum 2013.

c) Sekolah model yang telah dikembangkan mutu pendidikannya terdiri atas workshop sekolah model, pemberian bantuan, monitoring dan evaluasi ke sekolah model dan laporan pengembangan dan diseminasi sekolah Model. Pada tahun 2017 jumlah sekolah model yang dikembangkan mutu pendidikannya adalah sejumlah 7 sekolah dari target 20 Sekolah dengan capaian 35% dengan perincian 4 sekolah tiap kabupaten/kota. .

d) Hambatan dan kendala

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi kurikulum 2013 jenjang SMK adalah:

- 1) Mismatch mata pelajaran. Ada Instruktur Nasional (IN) dan Instruktur (IP) yang berasal dari mata pelajaran yang berbeda dengan mata pelajaran yang dilatih
- 2) Ada mata pelajaran tertentu yang IP-nya tidak bersedia menjadi narasumber pelatihan IK, padahal jumlah IP mata pelajaran tersebut terbatas
- 3) Kompetensi IP yang menjadi narasumber belum sesuai dengan yang diharapkan
- 4) Bervariasinya mata pelajaran di SMK, khususnya mata pelajaran untuk bidang/program/paket keahlian.
- 5) Waktu pelaksanaan kegiatan pelatihan bersamaan dengan waktu ujian, liburan sekolah serta berdekatan dengan hari raya

e) Langkah antisipasi yang dilakukan ke depan

Langkah antisipasi yang dilakukan ke depan terkait dengan implementasi kurikulum 2013 jenjang SMK adalah Untuk kegiatan pelatihan Instruktur Kabupaten/Kota (IK) dan Guru Sasaran (GS) :

- Melibatkan LPMP dalam memilih dan menentukan Instruktur Nasional (IN) dan Instruktur (IP) agar tidak terjadi mismatch mata pelajaran serta memiliki kompetensi yang memadai.
- Meminta IP membuat surat pernyataan kesediaan mengajar
- Variasi mata pelajaran di SMK, khususnya mata pelajaran untuk bidang/program/paket keahlian, dikelompokkan menjadi kelompok mata pelajaran serumpun.
- Kegiatan pelatihan dilaksanakan di awal sebesar.

Selain delapan indikator kinerja yang telah dimasukkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala LPMP Kalimantan Utara dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah terdapat kegiatan penunjang berupa dukungan manajemen dan tata kelola pelaksanaan tugas penjaminan mutu pendidikan dengan beberapa output sebagai berikut.

1. Layanan Kemitraan dibidang penjaminan Mutu pendidikan
2. Data dan informasi Mutu Pendidikan dasar dan menengah
3. Dokumen Perencanaan, Keuangan, Evaluasi, Pelaporan dan Ketatausahaan
4. Layanan Perkantoran
5. Perangkat Pengolah data dan Komunikasi

6. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
7. Gedung/bangunan

Dalam tahun 2017 LPMP Kalimantan Utara memiliki kantor yang terletak di Jalan Sengkawit Komplek Ruko Pasar Induk Gedung II Tanjung Selor Bulungan, yang berdampingan dengan kantor-kantor sementara milik pemerintah provinsi Kalimantan Utara.

## B. Capaian Kinerja Pegawai

Berdasarkan perjanjian kinerja pegawai melalui sistem Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), LPMP Kalimantan Utara memiliki 4 orang PNS yang menjadi penyelenggara atau pengoperasionalan kelembagaan. Dimulai Bulan September 2017 SKP pegawai LPMP Kalimantan Utara diaktifkan sesuai dengan Sumpah Jabatan dan Pelantikan pada tanggal 4 Agustus 2017. Sehingga formasi pegawai LPMP Kalimantan Utara, meliputi:

1. Kepala LPMP Kalimantan Utara
2. Kepala Sub Bagian Umum
3. Kepala Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu
4. Kepala Seksi Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan

Adapun hasil kinerja pegawai termuat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.12. Daftar Hasil Capaian Kinerja Tahun 2017

No	Nama Pegawai	Jabatan	Capaian Kinerja
1	Dr Jarwoko, M.Pd	Kepala	91.83
2	Emy Juwarni, M.Pd	Ka Sub Bag Umum	91.96
3	Drs Hari Purwanto, M.Si	Ka. Seksi SFPMP	92
4	Qudratullah Polanagau, S.Ag, M.Pd	Ka. Seksi SIPM	92

Selain 4 pegawai yang telah dilantik di LPMP Kalimantan Utara, terdapat 2 pegawai dari LPMP Lain yang memberikan dukungan tenaga dalam pelaksanaan kegiatan di LPMP Kalimantan Utara dan terdapat juga 4 orang tenaga honorer yang memberikan dedikasinya dalam kelancaran administrasi kelembagaan. Sehingga LPMP Kalimantan Utara dapat tertibat dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan tingkat pusat.

Keterlibatan LPMP Kalimantan Utara dalam mendukung ketercapaian Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi:

1. Pengawasan Pelaksanaan Post dan Pre Test PKB Guru di Wilayah Kalimantan Utara

2. Pengawasan Pelaksanaan UTN atau UKG di wilayah Kalimantan Utara
3. Diklat Peningkatan Mutu Pendidikan dalam Pemahaman Penilaian dan Penulisan Soal di Kabupaten Malinau
4. Kegiatan workshop perencanaan, pengadaan barang, aplikasi perencanaan maupun aplikasi keuangan

Kegiatan-kegiatan yang diikuti secara personal, secara tidak langsung memberikan tambahan nilai capaian kinerja lembaga.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPMP Kalimantan Utara tahun 2017 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan LPMP Kalimantan Utara kepada semua elemen masyarakat yang menjadi stakeholders dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di Kalimantan Utara pada tahun 2017.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa LPMP Kalimantan Utara telah berusaha merealisasikan program dan kegiatan pada tahun 2017 untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah. Hal ini didukung fakta bahwa kinerja LPMP Kalimantan Utara berhasil merealisasikan semua output dari kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran strategis LPMP Kalimantan Utara.

Adapun capaian kinerja LPMP Kalimantan Utara memfokuskan pada rencana pencapaian sasaran strategis yaitu meningkatnya penjaminan mutu pendidikan diseluruh jenjang pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara dengan hasil capaian kinerja yang diukur dengan 2 cara, yakni:

1. Pengukuran indikator kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang sesuai dengan renstra LPMP Kalimantan Utara tahun 2015 – 2019, dan
2. Pengukuran indikator kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang sesuai dengan output dalam DIPA LPMP Kalimantan Utara.

Sehubungan tentang capaian kinerja tahun 2017, berikut ini adalah beberapa catatan penting yang dapat menjadi informasi bagi pelaksanaan program di tahun berikutnya dan tindak lanjut evaluasi kinerja, yaitu:

1. Terus berupaya melakukan koordinasi/sinkronisasi program dengan Ditjen Dikdasmen dan pemerintah daerah terkait pelaksanaan program LPMP sehingga seluruh kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana dan jadwal yang sudah direncanakan untuk mencapai sasaran strategis yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
2. Terus berupaya untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana yang dimiliki untuk mewujudkan target kinerja sebaik-baiknya dan mampu menghasilkan output yang relevan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja LPMP;
3. Hasil evaluasi kinerja pada tahun 2017 dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait penyusunan program dan perbaikan dalam pelaksanaan program di tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2017 merupakan landasan yang kuat bagi LPMP Kalimantan Utara untuk melaksanakan program-program pada tahun berikutnya dan sekaligus menjadi barometer agar program-program pada masa yang akan datang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hal penting lainnya LPMP Kalimantan Utara harus menetapkan langkah

strategis, seperti: berkesinambungan, perubahan, penyesuaian, dan pembaharuan dalam reformasi pendidikan untuk menjawab tantangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di era persaingan global.

## LAMPIRAN



**Perjanjian Kinerja Tahun 2018**  
**Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara**  
**Dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah**

**TUGAS**

Melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi Kalimantan Utara berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

**FUNGSI**

Dalam melaksanakan tugas, LPMP Kalimantan Utara menyelenggarakan fungsi:

- a. pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- b. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar
- c. dan pendidikan menengah;
- d. supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam
- e. pencapaian standar nasional pendidikan;
- f. fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar
- g. dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
- h. pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi LPMP

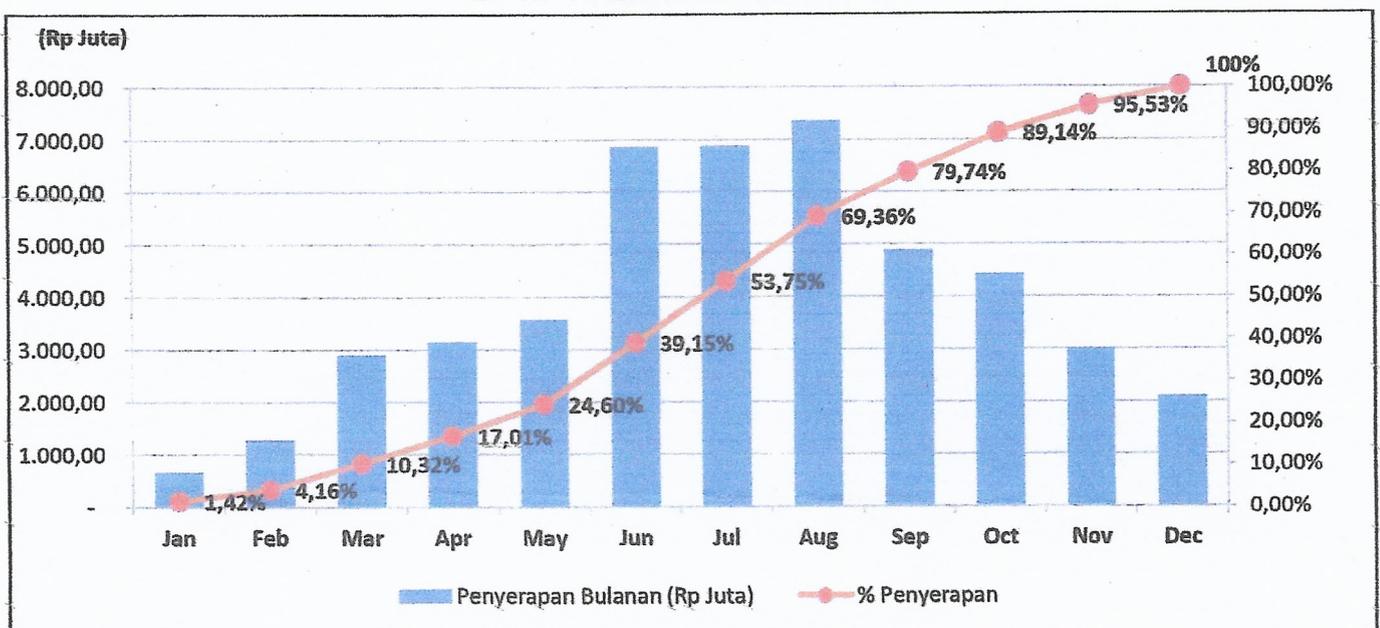
**TARGET CAPAIAN**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	ANGGARAN	
1	2	3	4	
1. Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya	1.290 sekolah SD,SMP,SMA, SMK	1.633.581.000	
	1 SD yang telah dipetakan mutunya	100%	1.301.798.548	
	2 Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya	75%		
	<i>Output:</i>			
	<i>SD yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	1028		
	3 SMP yang telah dipetakan mutunya	100%	211.478.947	
	4 Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya	80%		
	<i>Output:</i>			
	<i>SMP yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	167		
	5 SMA yang telah dipetakan mutunya	100%	101.307.280	
	6 Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya	80%		
	<i>Output:</i>			
	<i>SMA yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	80		
	7 SMK yang telah dipetakan mutunya	90%	24.060.479	
	8 Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya	70%		
	<i>Output:</i>			
	<i>SMK yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	19		
	Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP		100, sekolah SD,SMP,SMA, SMK	2.120.733.000
	Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013		438, sekolah SD,SMP,SMA, SMK	6.370.478.000
	9 SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP		60%	
	<i>Output:</i>			
<i>a. SD yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</i>		55	1166403150	
<i>b. SD yang melaksanakan Kurikulum 2013</i>		192	929636352	
10 SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP		60%		
<i>Output:</i>				
<i>a. SMP yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</i>		25	530183250	

		<b>b. SMP yang melaksanakan Kurikulum 2013</b>	<b>133</b>	<b>643966848</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP</b>	<b>60%</b>	
		<b>Output:</b>		
		<b>a. SMA yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</b>	<b>15</b>	<b>318109950</b>
		<b>b. SMA yang melaksanakan Kurikulum 2013</b>	<b>35</b>	<b>169464960</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP</b>	<b>60%</b>	
		<b>Output:</b>		
		<b>a. SMK yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</b>	<b>5</b>	<b>106036650</b>
		<b>b. SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013</b>	<b>43</b>	<b>208199808</b>
<b>2. Terwujudnya Tata kelola LPMP Kalimantan Utara yang baik</b>	<b>1</b>	<b>Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan</b>	<b>92%</b>	<b>1.763.020.000</b>
	<b>2</b>	<b>Nilai Minimal SAKIP LPMP Kalimantan Utara</b>	<b>78</b>	<b>0</b>

Total Jumlah Anggaran Kegiatan Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan : Rp. 25.050.000.000

## RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2018 LPMP KALIMANTAN UTARA



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Penyerapan Bulanan (Rp Ribu)	280,560	761,520	2,795,580	2,427,345	2,652,795	3,644,775	3,156,300	3,409,305	2,850,690	1,352,700	598,695	1,119,735
Penyerapan Kumulatif	280,560	1,042,080	3,837,660	6,265,005	8,917,800	12,562,575	15,718,875	19,128,180	21,978,870	23,331,570	23,930,265	25,050,000
% Penyerapan	1.12%	4.16%	15.32%	25.01%	35.60%	50.15%	62.75%	76.36%	87.74%	93.14%	95.53%	100.00%

## EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

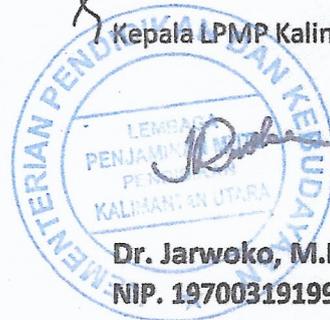
Jakarta, Januari 2018

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar  
Dan Menengah



Hamid Muhammad, M.Sc., Ph.D  
NIP. 195905121983111001

Kepala LPMP Kalimantan Utara



Dr. Jarwoko, M.Pd  
NIP. 197003191997031001